

**URGENSI PENGATURAN NORMA PARTISIPASI BERMAKNA
(*MEANINGFUL PARTICIPATION*) DALAM PROSEDUR PENGUSULAN
CALON HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(STUDI KASUS PENGUSULAN INOSENTIUS SAMSUL)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

Muhammad Yasser Umam

22071010105

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**URGENSI PENGATURAN NORMA PARTISIPASI BERMAKNA
(MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM PROSEDUR PENGUSULAN
CALON HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(STUDI KASUS PENGUSULAN INOSENTIUS SAMSUL)**



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh:
Muhammad Yasser Umam
22071010105**

Kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

URGENSI PENGATURAN NORMA PARTISIPASI BERMAKNA
(*MEANINGFUL PARTICIPATION*) DALAM PROSEDUR PENGUSULAN
CALON HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(STUDI KASUS: PENGUSULAN INOSENTIUS SAMSUL)

Penelitian Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Para hari Sina, tanggal 4 Mei 2026

Penyusun,


Muhammad Yasser Umam
NPM. 22071010105

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780813 202121 1 002


Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI
URGENSI PENGATURAN NORMA PARTISIPASI BERMAKNA
(MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM PROSEDUR PENGUSULAN
CALON HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(STUDI KASUS PENGUSULAN INOSENTIUS SAMSUL)

Penyusun


Muhammad Yasser Umar

22071010105

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026

Pembimbing

Dewan Penguji

Ketua


Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780813 202121 1 002


Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780813 202121 1 002

Anggota I


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota II


Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengosahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur


Dr. Erlien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
URGENSI PENGATURAN NORMA PARTISIPASI BERMAKNA
(MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM PROSEDUR PENGUSULAN
CALON HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(STUDI KASUS PENGUSULAN INOSENTIUS SAMSUL)

Penyusun


Muhammad Yasser Ummah
22071010105

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026

Pembimbing

Dewan Penguji
Ketua


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780813 202121 1 002


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780813 202121 1 002
Anggota I


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003
Anggota II


Wahyu, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur


Dr. Ertien Kining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yasser Umam

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 November 2004

NPM : 22071010105

Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Alamat : Jalan Rajawali Nomor 108, REWWIN, Waru, Sidoarjo

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat bagian yang merupakan karya ilmiah orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada suatu perguruan tinggi, serta tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dicantumkan sebagai sitasi dalam naskah dan dijelaskan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya juga menyatakan bahwa karya ilmiah ini sepenuhnya bebas dari unsur plagiarisme. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi plagiarisme dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Mei 2026



Muhammad Yasser Umam

NPM. 22071010105

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "URGENSI PENGATURAN NORMA PARTISIPASI BERMAKNA (*MEANINGFUL PARTICIPATION*) DALAM PROSEDUR PENGUSULAN CALON HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI KASUS PENGUSULAN INOSENTIUS SAMSUL)". Penulis berharap bahwa skripsi ini bisa membawa manfaat bagi diri penulis, kepada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, dan kepada nusa dan bangsa.

Skripsi ini dibuat oleh Penulis untuk menyelesaikan jenjang studi S-1 dan juga untuk kontribusi akademis kepada bangsa dan negara. Penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini tidak dilakukan sendiri melainkan juga ada kontribusi dukungan moral maupun substansial dari pihak-pihak lain. Pihak-pihak yang telah berjasa dan perlu penulis ucapan terima kasih kepada mereka, yaitu:

1. Bapak Ahmad Saiful Anam, S.E., dan Ibu Elly Agus Iriani, S.E., selaku Orang tua dari penulis yang tak hentinya memberikan motivasi dan telah merawat penulis dari kecil hingga sekarang.
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Dosen

Pembimbing Skripsi penulis yang telah mengarahkan dan membantu penelitian skripsi ini.

4. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan, saran, kritik, dan menguji penulis dengan evaluasi yang diberikan.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan secara administrasi kepada penulis dan kelompok penulis.
10. Afril Trianto Wicaksono dan Ryan Danuarta, teman sekaligus sahabat bagi penulis sejak semester awal yang senantiasa menemani dan menghibur penulis.
11. Anindya Dwiristani Febrinia, wanita hebat dan cerdas yang senantiasa menemani penulis dan menerima penulis sebagaimana adanya.

12. Seluruh para pihak yang telah berjasa untuk membantu, mendukung, dan membuat penulis bisa menjadi seperti sekarang, baik yang masih ada atau yang sudah tidak ada dalam kehidupan sehari-hari penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum menyentuh kata sempurna. Maka dengan itu, penulis membuka pintu saran dan kritik agar laporan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak termasuk penulis.

Surabaya, 5 Mei 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Muhammad Yasser Umam
NPM : 22071010105
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 November 2004
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

**URGENSI PENGATURAN NORMA PARTISIPASI BERMAKNA
(*MEANINGFUL PARTICIPATION*) DALAM PROSEDUR PENGUSULAN
CALON HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(STUDI KASUS PENGUSULAN INOSENTIUS SAMSUL)**

ABSTRAK : Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan partisipasi bermakna dalam prosedur pengusulan hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta penempatan hierarki pengaturannya dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya mekanisme partisipatif yang jelas sehingga membuka ruang kewenangan yang luas dan berpotensi melahirkan proses seleksi yang kurang transparan dan akuntabel. Penelitian bertujuan menganalisis kelemahan normatif pengaturan yang berlaku serta merumuskan konstruksi pengaturan ideal berdasarkan prinsip partisipasi bermakna. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan partisipasi publik masih bersifat umum dan belum menjamin keterlibatan masyarakat secara bermakna. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif pada tingkat undang-undang guna mewujudkan proses pengusulan hakim konstitusi yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan independensi peradilan.

Kata Kunci: hakim konstitusi, independensi peradilan, partisipasi bermakna, pengusulan hakim konstitusi, negara hukum.

ABSTRACT

This study examines the urgency of regulating meaningful participation in the procedure for nominating constitutional judges by the House of Representative and the appropriate placement of such regulation within the hierarchy of laws and regulations. The study is motivated by the absence of a clear participatory mechanism, which grants broad discretion to the nominating institution and may result in a selection process that is less transparent and accountable. It aims to analyze the normative weaknesses of the current framework and to formulate an ideal regulatory construction based on the principle of meaningful participation. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that the existing regulation remains general and declarative, without procedure guarantees for meaningful public involvement. Therefore, a more comprehensive statutory regulation is needed to ensure a transparent, accountable nomination process consistent with judicial independence.

Keywords: constitutional judges, judicial independence, judicial nomination, legal hierarchy, meaningful participation.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.	1
1.2 Rumusan Masalah.	9
1.3 Tujuan Penelitian.	9
1.4 Manfaat Penelitian.	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.	12
1.6.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	14
1.6.3 Bahan Hukum.....	15
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.	18
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	19

1.6.7 Jadwal Penelitian.....	21
1.7 Tinjauan Pustaka	22
1.7.1 Negara Hukum.	22
1.7.2 Teori Demokrasi.....	25
1.7.3 Mahkamah Konstitusi (<i>Constitutional Court</i>).	33
1.7.4 Teori Norma Hukum.	40
BAB II URGENSI PENGATURAN NORMA PARTISIPASI BERMAKNA DALAM PROSEDUR PENGUSULAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	48
2.1 Tinjauan Prosedur Pengusulan Hakim Konstitusi Dalam Kasus Pengusulan Inosentius Samsul.....	48
2.2 Urgensi Pengaturan Norma Partisipasi Bermakna dalam Prosedur Pengusulan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat	61
BAB III PELETAKAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TEPAT TERHADAP PENGATURAN NORMA PARTISIPASI BERMAKNA DALAM PROSEDUR PENGUSULAN CALON HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	85
3.1 Penempatan Norma Partisipasi Bermakna dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Prosedur Pengusulan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat	85
BAB IV PENUTUP	108
4.1 Kesimpulan	108
4.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tingkatan Partisipasi Publik dalam Arnstein's Ladder.	28
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.	10
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	21
Tabel 3. Model Konstruksi Norma Tahapan Prosedur Pengusulan Hakim Konstitusi Berdasarkan Partisipasi Bermakna.	75
Tabel 4. Pengaturan Norma Berdasarkan Letak Peraturan Secara Hierarkis.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. English Proficiency Test (EPT).....	125
Lampiran II. Transkrip Mata Kuliah.....	126
Lampiran III. Persetujuan Ujian Skripsi	127
Lampiran IV. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	128
Lampiran V. Kartu Bimbingan	129
Lampiran VI. Formulir Persetujuan Judul.	130
Lampiran VII. Bukti Pembayaran UKT.....	131
Lampiran VIII. Bukti KRS Terbaru	132
Lampiran IX. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	133
Lampiran X. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	134
Lampiran XI. Surat Keterangan Hasil Uji Plagiasi.....	135
Lampiran XII. Hasil Turnitin Skripsi.....	136
Lampiran XIII. Letter of Acceptance Artikel Jurnal.....	137
Lampiran XIV. Hasil Turnitin Artikel Jurnal	138
Lampiran XV. Sertifikat Library Class	139
Lampiran XVI. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	140
Lampiran XVII. Tautan Referensi	141
Lampiran XVIII. Lembar Revisi Dosen Penguji 1	147
Lampiran XIX. Lembar Revisi Dosen Penguji 2	148
Lampiran XX. Lembar Revisi Dosen Penguji 3	149